

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SIMEULUE)**

SKRIPSI

OLEH

DINA FEBRI ANGGRAINI
NIM: 1805906030051



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 15 Juni 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Dina Febri Anggraini
NIM : 1805906030051
Dengan Judul : **PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Mengesahkan:

Pembimbing

Fatmayanti, SE., M.Si
NIP: 199005302019032015

Mengetahui:

Dekan Fakultas



Hamdi Harmen., SE., MM
NIP: 196911082002121002

Plt. Ketua Program Studi akuntansi

Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si.Ak.
NIP: 198910052019032037



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 15 Juni 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi

Nama : Dina Febri Anggraini
NIM : 1805906030051
Dengan Judul : **PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE)**

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada 29 September 2022

Menyetujui

Komisi Ujian

Tanda Tangan

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Fatmayanti, S.E., M.Si |
| 2. Sekretaris | : Sari Maulida Vonna, S.E, M.Si.Ak |
| 3. Anggota | : Linda Rahmazaniati, S.E, M.Si.Ak |

Mengetahui :

Plt. Ketua Program Studi

Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si., Ak
Nip: 198910052019032037

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Febri Anggraini

NIM : 1805906030051

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 24 Juni 2023



Dina Febri Anggraini

Dina Febri Anggraini
Nim: 1805906030051

PERSEMBAHAN

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.Lukman:27)

Ya Allah. . .

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakanlah kami dengan ketekunan dan hasilah dirikami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya dan mintalah pertolongan-Nya dengan shalat dan sabar Alhamdulillah. . .

Dengan ridha-Mu ya Allah

Amanah ini telah selesai, sebuah langka usai sudah, Namun itu bukan akhir dari perjalananku, Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Ayah Mamak. . .

Do'a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta ketulusan mu Yang kuatkan hatiku tuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.

Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai.

Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu Terimakasih ayah mamak atas segala

kesabaranmu, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putramu.

Ya Allah jadikanlah aku anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, membanggakan orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridha Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku
tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta ayahanda dan
ibunda yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan atas segala perhatian,
pengertian, dan dukungannya.

Dina Febri Anggraini

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah atas berkah dan rahmad-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik tugas proposal skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Teuku Umar.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan tak lupa pula, dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan dan saran. Maka pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada:

- 1) Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Aceh.
- 2) Bapak Hamdi Harmen, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Aceh.
- 3) Ibu Sari Maulida Vonna, SE., M.Si. Ak selaku Plt. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- 4) Ibu Sari Maulida Vonna, SE., M.Si. Ak, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

- 5) Ibu Fatmayanti, SE., M.Si. Ak Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal penulisan proposal skripsi yang baik dengan ada arahan dan dorongan sehingga proposal skripsi ini selesai.
- 6) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
- 7) Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan proposal skripsi ini.

Meulaboh, 8 November 2022
Penulis

(Dina Febri Anggraini)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Febri Anggraini

NIM : 1805906030051

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 24 Juni 2023

Yang Menyatakan

Materai 10000

Dina Febri Anggraini
1805906030051

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada kantor dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue yang berjumlah 45 instansi/Dinas. Metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *random sampling* dengan sampel berjumlah 15 instansi/Dinas. Metode analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan software IBM SPSS versi 26 sebagai alat mengolah data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel perencanaan anggaran dan variabel sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan secara simultan variabel perencanaan dan variabel sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Perencanaan Anggaran dan Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of providing empirical evidence about the influence of budget planning and regional financial information systems on the quality of local government financial reports. This research was conducted at the Simeulue Regency Regional Government service offices, totaling 45 agencies/services. The sample selection method used in this study was a random sampling technique with a sample of 15 agencies/services. The data analysis method in this study used multiple linear regression analysis techniques assisted by IBM SPSS version 26 software as a data processing tool. The results of this study indicate that partially the budget planning variables and regional financial information system variables affect the quality of local government financial reports. And simultaneously planning variables and regional financial information system variables influence the quality of local government financial reports.

Keywords: *Quality Of Local Government Financial Reports, Budget Planning and Regional Financial Information System Variables.*

DAFTAR PUSTAKA

JUDUL	I
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PUSTAKA	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)	8
1.4.2 Manfaat Akademis (Teoritis).....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.2 Konsep Anggaran.....	9
2.1.3 Model Penyusunan Anggaran	10
2.1.4 Konsep Perencanaan Anggaran	11
2.1.5 Sistem Informasi Keuangan Daerah	12
2.1.6 Jenis-Jenis Informasi Keuangan Daerah.....	12
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.1.8 Manfaat Laporan Keuangan.....	13
2.1.9 Tujuan Laporan Keuangan.....	13
2.1.10 Penelitian Terdahulu	14
2.1 Kerangka Pemikiran	17
2.1.1 Perencanaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	17
2.2.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	17
2.2.3 Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.3 Hipotesis	18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Populasi dan Sampel	22
3.2.1 Populasi	22
3.2.2 Sampel	22
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Definisi Operasional Variabel	24
3.4.1 Variabel Dependen	24
3.4.2 Variabel Independen	25
3.5 Definisi Operasional	25
3.6 Metode Analisis Data	26
3.6.1 Uji Instrumen	27
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	28
3.6.3 Uji Hipotesis	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2 Karakteristik Responden	36
4.3 Hasil Uji Instrumen	38
4.3.1 Hasil Uji Validitas	38
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	40
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	41
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	42
4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	43
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi	45
4.5 Hasil Uji Hipotesis	46
4.5.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)	46
4.5.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	49
4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50
4.6 Pembahasan	51
4.6.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	51
4.6.2 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	52
4.6.3 Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Secara Bersama-Sama (Simultan) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.1 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Anggaran	12
Gambar 2.2 Skema Pemikiran.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	27
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	38
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian	40
Tabel 4.1 Hasil uji Reliabilitas.....	42
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik f	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	62
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	65
Lampiran 3 Daftar Populasi Penelitian	66
Lampiran 4 Jawaban Responden	69
Lampiran 5 Hasil Uji Statistik	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia mengikuti sejarah kemerdekaan dan reformasi di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, pengelolaan dan pertanggungjawaban Hindia Belanda (sebutan Indonesia sebelum merdeka) menggunakan *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Ketentuan ICW tersebut digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sampai tahun 2003. Untuk melaksanakan ICW pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1948 yang mengamanatkan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara sejak Tahun 1948. Namun karena ketiadaan informasi, pada Tahun 1971 ditemukan Undang-Undang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara yaitu UU No.11 Tahun 1971 tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun 1967 (kemenkeu.go.id).

Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun oleh Kementerian Keuangan, yang berasal dari Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) Kementerian atau lembaga. Pemerintah menyampaikan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) ke DPR RI paling cepat 2 (dua) tahun sesudah berakhir tahun anggaran karena proses penyusunan SPA dan PAN secara manual sehingga membutuhkan waktu lama. Dari ilmu Akuntansi, PAN ini tidak dapat dikategorikan sebagai laporan keuangan karena disusun tidak berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku umum dan

hanya berisikan anggaran dan realisasinya, tidak ada laporan keuangan yang berisikan informasi tentang Aset.

Era baru manajemen keuangan Negara dimulai pada Tahun 2003 dengan terbitnya 3 (tiga) paket UU bidang Keuangan Negara yaitu UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut mereformasi manajemen keuangan Negara, salah satunya terkait dengan pertanggungjawaban APBN/APBD. Dalam ketentuan tersebut diamanatkan agar Presiden RI dan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR RI/DPRD paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhir tahun anggaran, sesudah diaudit oleh BPK RI.

Perkembangan laporan keuangan Pemerintah tidak terlepas dari perkembangan kemajuan suatu Negara terutama pengelolaan keuangan dan kondisi politik. Kondisi Negara yang baik pasti melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, beberapa prinsip *good governance* antara lain Akuntabilitas dan Transparansi. Yang dimana prinsip Akuntabilitas mengharuskan Pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat termasuk pelaksanaan anggarannya (APBN/APBD). Demikian juga prinsip Transparansi, Pemerintah harus mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu Negara dikatakan menerapkan *good governance* terutama prinsip Akuntabilitas dan Transparansi apabila Negara tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum (kemenkeu.go.id).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Laporan keuangan juga memiliki tujuan dari segi sektor publik dan sektor swasta, laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik menurut *Government Accounting Standard Board* (2009:54) adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, melaporkan hasil operasi, melaporkan kondisi keuangan dan melaporkan sumberdaya jangka panjang. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih banyak laporan keuangan yang tidak memenuhi unsur-unsur kualitas laporan keuangan khususnya Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi yang dimana transparansi harus memberikan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut, agar adanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses. Laporan keuangan di Kabupaten Simeulue masih belum sepenuhnya transparan kepada masyarakat, dimana beberapa dinas-dinas di Kabupaten Simeulue tidak mempublik laporan keuangannya setiap tahun di website masing-masing. Transparansi dilakukan oleh pemerintah daerah guna agar terhindar dari berbagai

kecurangan dalam penyusunan/pengelolaan laporan keuangan. Karena laporan keuangan berkualitas menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel dengan menyesuaikan prinsip-prinsip akuntansi. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue belum sepenuhnya memenuhi kualitas laporan keuangan Pemerintah seperti yang disebutkan dalam karakteristik kualitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi Akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Hal tersebut untuk memenuhi kualitas laporan keuangan yang: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Yusup, 2016).

Suatu bisnis dalam perusahaan wajib memiliki perencanaan anggaran sebagai bentuk pemantauan ekonomi internal perusahaan anggaran juga memiliki tujuan dan manfaat penting dalam sebuah perusahaan yang biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau bisa lebih. Reformasi penyusunan anggaran diamanatkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*). Menurut Munandar (2011) anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan suatu pedoman dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, perusahaan maupun Negara. Di pemerintahan Indonesia jenis anggaran yang digunakan disebut APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah. Sedangkan dilingkup pemerintahan daerah jenis anggaran yang digunakan disebut APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Anggaran sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi keuangan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam operasional sebuah perusahaan.

Kebijakan daerah juga mempunyai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah (PP RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 15). Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 6). Dengan adanya penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu.

Penggunaan teknologi informasi didalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program. Tanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan ada pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di zaman yang semakin canggih seperti saat ini sudah banyak yang meninggalkan cara manual untuk mengerjakan laporan keuangan. Di Kabupaten Simeulue sudah

menerapkan sistem informasi keuangan daerah dengan cara modern seperti komputer serta aplikasi-aplikasi pendukung lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue?
2. Apakah sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue?
3. Apakah perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama (simultan) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

1. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Simeulue.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem perencanaan anggaran yang baik serta sistem informasi keuangan daerah yang lebih efektif khususnya di Kabupaten Simeulue.

1.4.2 Manfaat Akademis (Teoritis)

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perencanaan dan sistem informasi keuangan yang harus dilakukan untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik serta variabel yang mempengaruhi.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti untuk menambah ilmu mengenai akuntansi pemerintah.
3. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan antara perencanaan anggaran, sistem informasi keuangan dan kualitas laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.2 Konsep Anggaran

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut *Governmental Accounting Standarts Board (GASB)* definisi anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Menurut Sujarweni (2017:28), isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang di representasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sujarweni melanjutkan, anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2018:78) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan kepada publik, guna menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

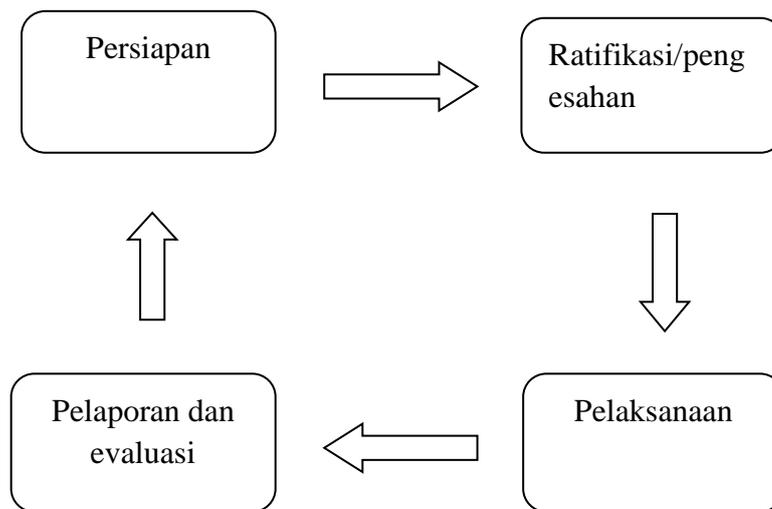
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, maka dari itu anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*) masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran.

2.1.3 Model Penyusunan Anggaran

Menurut Harahap (20013:20), penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Metode yang dapat dipergunakan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Otoriter atau *Top Down*. Dalam metode ini anggaran dapat disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan. Kemudian anggaran dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dalam penyusunan.
2. Demokrasi atau *Bottom Up*. Anggaran yang disusun dalam metode ini berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan.
3. Campuran antara *Top Down* dan *Bottom Up*. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode diatas, penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya dilengkapi oleh karyawan bawahan.

Adapun siklus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Siklus Anggaran

2.1.4 Konsep Perencanaan Anggaran

Menurut Halim & Kusufi (2014:48) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu, 2017) tahapan proses perencanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun.
2. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
3. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rencana Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD (KUA).
4. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala

daerah menerbitkan pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

5. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

2.1.5 Sistem Informasi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengolah data dan bukti transaksi pemerintahan, mengolah, serta menyediakan informasi keuangan daerah terhadap para pengguna laporan keuangan.

2.1.6 Jenis-Jenis Informasi Keuangan Daerah

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

1. APBD
2. Perubahan APBD
3. Laporan Realisasi APBD Semester I
4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan)
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Laporan keuangan

yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Laporan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari karakteristik kualitatif.

2.1.8 Manfaat Laporan Keuangan

Manfaat laporan keuangan sangat berpengaruh banyak bagi setiap pihak, yaitu pihak eksternal dan internal. Manfaat laporan keuangan menurut Martono & Agus (2010:52) laporan keuangan yang baik dan akurat memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan pemberian kredit
3. Penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi
5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis penggunaan dana

2.1.9 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hans (2016:126) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi, juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang akan diuraikan secara ringkas karena penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan baik dari segi objek maupun dari segi waktu penelitian. Seperti pada penelitian terdahulu berikut ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Yusup (2016)	Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Sederhana	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 72,1%, sementara sisanya 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Persamaan: • Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Perbedaan: • Tempat penelitian.

Tabel 2.1
Lanjutan

2	Lestari (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sistem Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern • Tempat penelitian
3	Sriwijayanti (2018)	Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD	Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Berganda	1. Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara persial melalui uji t berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBD. 2. Secara bersama-sama (simultan) melalui uji f, Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah juga berpengaruh terhadap Pengelolaan APBD.	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan APBD • Tempat penelitian.
4	Wulandari (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan Anggaran dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Malang)	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Secara persial Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. 2. Secara Persial Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. 3. Secara Persial Pengalaman Kerja tidak berpengaruh secara	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Perencanaan Anggaran dan Kualitas Laporan Keuangan Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengalaman Kerja • Tempat penelitian.

Tabel 2.1
Lanjutan

				signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.	
5	Evicahyani (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.	Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	<p>1. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD kabupaten tabanan.</p> <p>2. Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD kabupaten tabanan.</p> <p>3. Pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD kabupaten tabanan.</p> <p>4. Penerapan SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD kabupaten tabanan.</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kualitas Laporan Keuangan. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Analisis Faktor-Faktor • Tempat penelitian.
6	Kuasa, dkk (2016)	Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>1. Kompetensi, Regulasi dan Pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.</p> <p>2. Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.</p> <p>3. Regulasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.</p> <p>4. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kualitas Laporan Keuangan <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah • Tempat penelitian.

Tabel 2.1
Lanjutan

			Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.	.
--	--	--	--	---

(sumber: data di olah 2022)

2.1 Kerangka Pemikiran

2.1.1 Perencanaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hubungan perencanaan anggaran dengan kualitas laporan keuangan menurut Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa informasi akuntansi (laporan keuangan) diperlukan untuk perencanaan keuangan, menghitung biaya program dan penganggaran. Suatu anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang karena dalam sebuah anggaran akuntansi sangat dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah. Menurut penelitian Wulandari (2021) secara persial perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.

2.2.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya, sistem informasi keuangan sangat membantu dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dan bebas dari kesalahan saji. Empat karakteristik prasyarat ukuran normatif yang harus diwujudkan agar dapat memenuhi kualitas laporan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Chairina, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan Yusup (2016)

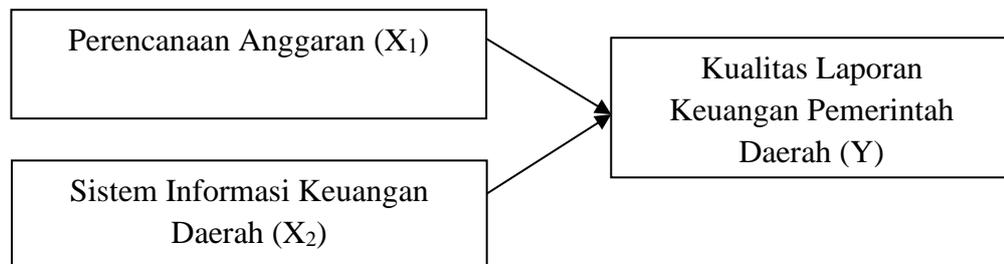
sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sebesar 72,1%.

2.2.3 Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Suatu daerah harus mempunyai perencanaan anggaran yang dimana memiliki tujuan dan manfaat penting bagi daerah tersebut. Selain itu sistem informasi juga sangat penting untuk mengolah data keuangan yang berhubungan langsung dengan data transaksi guna untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas di pemerintah masing-masing. Menurut hasil penelitian Musdalifah (2019) bahwa perencanaan anggaran, sistem informasi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka dirumuskannya kerangka penelitian yang di gambarkan dibawah ini:



Gambar 2. 2 Skema Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. H₂ : Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. H₃ : Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Suliyanto (2018: 115) menjelaskan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penerapan metode untuk menguji atau meneliti sebuah teori dengan cara menganalisis hubungan antar variabel melalui prosedur statistik (Suhendro, 2019).

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada data numerik (angka) dari nilai jawaban kuesioner. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atau memprediksi kejelasan dan situasi yang menunjukkan jenis penelitian yang akan dilakukan dan menarik kesimpulan.

2. Jenis Investigasi

Penelitian ini bersifat kausal komperatif (*causal comperative research*), jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel atau lebih yang menyebabkan suatu permasalahan, sehingga dapat diketahui pengaruh perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simeulue.

3. *Setting* Penelitian

Setting penelitian merupakan tempat atau wilayah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun pendekatan penelitian dan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuisisioner yang dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada responden. Adapun isi dari kuisisioner berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi untuk penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simeulue.

4. Tingkat Keterlibatan Peneliti

Pada penelitian ini peneliti mengkaji dan menguji variabel-variabel dan hipotesis yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan yang terjadi pada lingkungan penelitian sebenarnya.

5. Unit Analisis

Unit analisis ditentukan berdasarkan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan elemen penting dalam desain penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Kepala SKPD, Sub Bagian Perencanaan Program, dan Sub Bagian Keuangan.

6. Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan sekitar 2 minggu, agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Kerja yang berada di lingkup kantor dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue yang berjumlah 45 instansi/Dinas. Dilampirkan dihalaman lampiran halaman 66.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian populasi yang hendak diuji karakteristiknya (Suliyanto, 2018:177). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* atau biasa disebut acak sederhana dengan menggunakan undian. Setelah dilakukan acak sederhana dengan menggunakan undian maka sampel pada penelitian ini berjumlah 15 instansi/Dinas. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini hanya yang berkaitan dengan proses penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini adalah bagian Kepala Dinas, Sub Bagian Perencanaan

Program, dan Sub Bagian Keuangan. Berikut ini merupakan tabel 15 Instansi/Dinas yang dipilih untuk penelitian.

Tabel 3.2
Nama Instansi/Dinas

No	Nama Instansi/Dinas/Badan
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3	Inspektorat
4	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Dinas Kesehatan
7	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
8	Dinas Pendidikan
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Pertanahan
11	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Dinas Sosial
13	Sekretariat Daerah
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
15	Sekretariat Kecamatan Teupah Barat

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:137) pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer.

Selanjutnya Sugiyono (2017:138) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk kuesioner (angket).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2018:38) operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Definisi, pengukuran, dan skala pengukuran dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan skor setiap indikator (Handayani, 2019). Skala linkert yang berisi 5 tingkat preferensi yaitu: 1) sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3) netral; 4) setuju; 5) sangat setuju.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2018). Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Variabel diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan skor setiap indikator.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional atau sering dinamakan juga sebagai operasionalisasi variabel yaitu kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur (Zulganef : 2013) Adapun definisi dan indikator dari setiap variabel terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang brkepentingan (Sutejo, 2018).	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja hukum bagi transparansi • Akses masyarakat terhadap transparansi • Audit yang independen dan efektif • Keterlibatan masyarakat 	Likert 1-5

Tabel 3.2
Lanjutan

Perencanaan Anggaran (X1)	Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang (Munandar, 2007:11).	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan kebutuhan • Sesuai dengan tupoksi OPD • Pencapaian sasaran Renja/Renstra 	Likert 1-5
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2)	Sebagaimana dinyatakan dalam PP No.56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya software pendukung • Ketersediaan jaringan internet • Dimanfaatkan sesuai ketentuan • Proses terkomputerisasi • Mempunyai website 	Likert 1-5

(Sumber: data di olah 2022)

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang akan diisi oleh responden kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data atau SPSS untuk menghasilkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan rumus persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (variabel dependen)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Perencanaan Anggaran

β_2 = Koefisien regresi Sistem Informasi Keuangan Daerah

X_1 = Perencanaan Anggaran (variabel independen)

X_2 = Sistem Informasi Keuangan Daerah (variabel independen)

e = Standar error

Langkah-langkah dalam mengelola data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:267), uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Sanusi (2011:76), suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen pada umumnya digunakan standar perbandingan antara nilai r -tabel dengan r -hitung pada taraf kepercayaan 95 % atau tingkat signifikan 5 %.

2. Uji Reabilitas

Menurut Sanusi (2011:80), uji reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang berlainan dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berlainan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu

data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiono, 2017:268). Uji reliabilitas data menggunakan formula *Conbrach Alpha* $> 0,60$ (Sanusi, 2011:80)

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model atau regresi suatu variabel independen dan dependen maupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametric-test* (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (Sarjono dan Julianita, 2018:38). Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara melihat grafik normal *probability plot* dan uji statistik *One Sample Kalmogorov-Smirnov Test*. Adapun kriteria pengujian: a) Jika signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. b) Jika signifikan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:36) uji multikolinieritas dimaksud untuk menguji apakah ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antara

variabel bebas atau tidak bebas dalam model regresi. Untuk melihat adanya korelasi yang tinggi antar variabel dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Menurut Ghazali (2018:36) *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat dinyatakan sebagai berikut: a) jika nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka terjadi multikolinieritas. b) jika nilai VIF > 10 dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Sujarweni (2017:232) menyatakan bahwa uji heterokedasitas digunakan untuk mengetahui perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pada penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Menurut Ghazali (2018) dasar analisis pada uji heterokedasitas dengan yaitu dengan cara meregresi absolut residual yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $> \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
- 2) Jika nilai signifikansi $< \alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2019) autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Run Test. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian, apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Dengan hipotesis sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2019):

- 1) Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 5% atau 0,05, maka untuk H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara tidak acak (sistematis).
- 2) Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak (random).

3.6.3 Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi besaran nilai variabel terikat (*dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*). Regresi linier berganda digunakan bila jumlah variabel

independennya minimal dua (Sugiyono, 2018:275). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah. Sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Sanusi (2011:138) menyatakan bahwa uji statistik t digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian hipotesis ini untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai signifikan $< 0,05$ artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikan $> 0,05$ artinya model penelitian tidak layak digunakan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya

selalu positif (Sanusi, 2011:136). Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011:136).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Simeulue yang terletak di Aceh, Indonesia, adalah sebuah wilayah yang terletak di Aceh. Ibukota dari kabupaten ini sendiri berpusat di kota Sinabang. Kabupaten ini terletak sekitar 150 km di lepas pantai barat Aceh, dan berdiri tegak di Samudera Hindia. Kabupaten simelue merupakan pemekaran dari kabupaten aceh barat sejak status daerah ini dinaikkan dari kecamatan menjadi kabupaten yang terjadi pada tahun 1996. Kemudian, pada tahun 1999 Kabupaten Simeulue resmi berdiri. Pemekaran tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini dan memberikan fokus yang lebih besar pada kebutuhan masyarakat setempat. Wilayah Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dan 138 desa, Pemerintah daerah kabupaten Simeulue ini mempunyai 45 Dinas/Badan yang berada dipusat kota dan kecamatan masing-masing.

Posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, hiruk-pikuk konflik yang pernah terjadi di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM di kawasan kepulauan Simeulue ini. Beberapa pemasukan ekonomi masyarakat yang menjadi ciri khasnya adalah peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan minyak bumi. Yang berpenghasilan lumayan dan juga sudah pernah diekspor keluar daerah bahkan keluar Negeri.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja.

Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan dari sebuah penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada tiap Instansi/Dinas/Badan yang berjumlah 15. Penyebaran kuesioner diberikan kepada Kepala Dinas, Sub Bagian Perencanaan Program, dan Sub Bagian Keuangan di tiap Instansi/Dinas/Badan tersebut. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	26	58%
		Perempuan	19	42%
	Total		45	100%
2	Usia	21-30 Tahun	2	4%
		31-40 Tahun	10	22%
		41-50 Tahun	17	38%
		51-60 Tahun	16	36%
	Total		45	100%
3	Pendidikan Terakhir	SMA/ sederajat	4	9%
		D1/D2/D3	5	11%
		S1 (Sarjana)	33	73%
		S2 (Magister)	3	7%
		S3 (Dokter)	0	0
	Total		45	100%
4	Masa Kerja	<5 Tahun	2	4%
		5-10 tahun	1	2%
		11-15 Tahun	16	36%
		>15 Tahun	26	58%
	Total		45	100%

Sumber: hasil penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat disimpulkan bahwa Instansi/Dinas/Badan tempat saya penelitian sebagian besar yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki yakni berjumlah 26 orang (58%). Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang (42%). Usia responden dalam penelitian ini dapat dirincikan dengan kategori usia 21-30 tahun sebanyak 2 orang

(4%), usia 31-40 tahun sebanyak 10 orang (22%), usia 41-50 tahun sebanyak 17 orang (38%), dan usia 51-60 tahun sebanyak 16 orang (36%). Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini sebagian besar dari lulusan S1 yang berjumlah 33 orang (73%), dari lulusan SMA/Sederajat berjumlah 4 orang (9%), lulusan D1/D2/D3 diketahui berjumlah 5 orang (11%), lulusan S2 berjumlah 3 orang (7%), dan lulusan S3 dalam responden ini tidak ada (0%). Kemudian masa kerja responden dalam penelitian ini dibawah 5 tahun berjumlah 2 orang (4%), masa kerja 5-10 tahun berjumlah 1 orang (2%), masa kerja 11-15 tahun berjumlah 16 orang (36%), dan masa kerja diatas 15 tahun berjumlah 26 orang (58%).

4.3 Hasil Uji Instrumen

Uji instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan/pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 15 Instansi/Dinas/Badan dan jumlah responden sebanyak 45 orang dengan memberikan 30 butir pernyataan. Butir pernyataan dibagi menjadi tiga variabel yaitu perencanaan anggaran, sistem informasi keuangan daerah, dan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah untuk menguji validnya seluruh pernyataan tersebut.

Kemudian setiap variabel dibagi menjadi beberapa indikator. Variabel perencanaan anggaran (X1) dibagi menjadi 3 indikator dengan 10 butir pernyataan, variabel sistem informasi keuangan daerah (X2) dibagi menjadi 5 indikator dengan 10 butir pernyataan dan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dibagi menjadi 4 indikator dengan 10 butir pernyataan. Berikut ini adalah hasil uji validitas yang diberikan kepada 45 responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Item pertanyaan	Nilai Rhitung (<i>Person Correlation</i>)	Nilai Rtabel	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)			
X1,1	0,476	0,294	Valid
X1,2	0,550	0,294	Valid
X1,3	0,643	0,294	Valid
X1,4	0,729	0,294	Valid
X1,5	0,676	0,294	Valid
X1,6	0,566	0,294	Valid
X1,7	0,561	0,294	Valid
X1,8	0,640	0,294	Valid
X1,9	0,539	0,294	Valid
X1,10	0,537	0,294	Valid
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2)			
X2,1	0,793	0,294	Valid
X2,2	0,741	0,294	Valid
X2,3	0,608	0,294	Valid
X2,4	0,581	0,294	Valid
X2,5	0,697	0,294	Valid
X2,6	0,732	0,294	Valid
X2,7	0,533	0,294	Valid

Tabel 4. 4
Lanjutan

X2,8	0,597	0,294	Valid
X2,9	0,534	0,294	Valid
X2,10	0,532	0,294	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)			
Y1,1	0,763	0,294	Valid
Y1,2	0,604	0,294	Valid
Y1,3	0,553	0,294	Valid
Y1,4	0,517	0,294	Valid
Y1,5	0,452	0,294	Valid
Y1,6	0,524	0,294	Valid
Y1,7	0,549	0,294	Valid
Y1,8	0,453	0,294	Valid
Y1,9	0,637	0,294	Valid
Y1,10	0,418	0,294	Valid

Sumber: *Output SPSS 26 (2022)*

Berdasarkan hasil validitas di atas, maka diperoleh nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) untuk masing-masing variabel seperti yang terdapat pada tabel di atas. Sedangkan r_{tabel} bisa dihitung pada tabel r statistik dengan uji dua arah yang hasilnya adalah 0,294. Diketahui bahwa nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) lebih besar dari nilai 0,294 (r_{tabel}) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan yang ada dalam variabel dinyatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pedoman alat ukur dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,60 atau lebih (Sanusi, 2011:80). Berikut merupakan hasil dari pengujian reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>N Of Items</i>	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0,745	11	Reliabel
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2)	0,754	11	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,733	11	Reliabel

Sumber: *Output SPSS 26 (2022)*

Hasil dari pengujian reliabilitas menunjukkan hasil bahwa variabel Perencanaan Anggaran (X1) memperoleh nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,745 yang lebih besar dari 0,60 atau ($0,745 > 0,60$). Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2) memperoleh nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,754 yang lebih besar dari 0,60 atau ($0,754 > 0,60$) dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,733 yang lebih besar dari 0,60 atau ($0,733 > 0,60$). Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian ini adalah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel. Yang dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu menghasilkan data yang konsisten, sehingga apabila jika pertanyaan ini diajukan kembali akan menghasilkan jawaban yang relatif sama.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis merupakan salah satu syarat dalam analisis regresi linier berganda harus memenuhi uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini jenis uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah data didalam sebuah regresi telah berdistribusi dengan normal. Uji normalitas menjadi hal penting, karena salah satu syarat pengujian *parametric-test* (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (Sarjono dan Julianita, 2018:53). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *uji kolmogorov-smirnov*. Pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov Smirnov* dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu. Jika nilai probabilitas *asyp.sig (2-tailed)* pada uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data memiliki distribusi normal, sebaliknya jika probabilitas *asyp.sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas yang dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	2.08406300
Most Extreme Differences	Absolute	0.089
	Positive	0.064
	Negative	-0.089
Test Statistic		0.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *Output SPSS 26 (2022)*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *absolute Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,89 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200. Yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengujian ini bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Sugiyono (2018:107) Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi maka terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada multikolonieritas. Uji multikoliniretas dapat dilihat jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka terjadi multikolinieritas dan jika nilai $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian multikolinieritas yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Perencanaan Anggaran	0,999	1,001
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	0,999	1,001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber: *Output SPSS 26 (2022)*

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel independen yakni sebesar 0,999 yang lebih besar dari 0,10 yang berarti korelasi antar variabel independen kurang dari 100%. Dan masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai *varians inflation factor* (VIF) sebesar 1,001 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat

disimpulkan bahwa jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka data dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan pengujian menggunakan metode *Glejser* dengan ketentuan apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Nurkhasanah, 2019). Hasil uji heteroskedastisitas terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,759	3,007		2,248	0,030
	Perencanaan Anggaran	-0,065	0,052	-0,189	-1,263	0,213
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	-0,053	0,046	-0,172	-1,148	0,257

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: *Output SPSS 26 (2022)*

Berdasarkan hasil dari pengujian *glejser*, diperoleh nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji Glejser, hipotesis menyatakan bahwa jika tingkat probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (H₀ diterima). Sedangkan hipotesis menyatakan bahwa jika tingkat probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan terjadi heteroskedastisitas (H_a

ditolak). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi yang tinggi atau tidak. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi menggunakan *run test*, Dengan hipotesis sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H₀ : nilai sig > 0,05, residual random (acak)

H_a : nilai sig < 0,05, residual tidak random

Berikut ini hasil uji autokorelasi menggunakan *run test*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,03836
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	18
Z	-1,505
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,132
a. Median	

Sumber: *Output SPSS 26 (2022)*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2- tailed)* di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 sehingga H₀ tidak dapat ditolak. Hal ini

berarti data yang dipergunakan tersebar (*random*). Maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

4.5 Hail Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan model regresi linear berganda. Uji regresi berganda digunakan untuk memprediksi berapa besar pengaruh variabel terikat (*dependent*) terhadap variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda data pengamatan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu variabel. Secara umum, data hasil pengamatan Y dipengaruhi oleh variabel bebas.

4.5.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari perencanaan anggaran (X_1) dan sistem informasi keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,220	5,461		2,787	0,008
	Perencanaan Anggaran	0,321	0,094	0,400	3,413	0,001
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	0,371	0,083	0,522	4,450	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: hasil penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji T pada tabel dari masing-masing variabel independen, sedangkan nilai Ttabel diperoleh melalui tabel T dengan rumus ($\alpha: 0,05$ dan $Df: n-2$) sehingga $\alpha: 0,05$ dan $Df: 45-2 = 43$, maka diperoleh nilai Ttabel sebesar 1,681 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel perencanaan anggaran (X1) memiliki nilai Thitung sebesar 2,787 dan nilai Ttabel sebesar 1,681, yang artinya bahwa nilai Thitung lebih lebih besar dari nilsi Ttabel atau ($2,787 > 1,681$) dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari variabel ini sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 atau ($0,001 > 0,05$) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa varaibel perencanaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Variabel sistem informasi keuangan daerah (X2) memiliki nilai Thitung sebesar 4,450 dan nilai Ttabel sebesar 1,681, yang artinya bahwa nilai Thitung lebih lebih besar dari nilsi Ttabel atau ($4,450 > 1,681$) dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari variabel ini sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 > 0,05$) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa varaibel sistem informasi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, nilai *constant* sebesar 15,220 sedangkan nilai koefisien perencanaan anggaran sebesar 0,321 dan nilai koefisien sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,371. Dengan demikian maka persamaan regresi yang terbentuk untuk uji regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = 15,220 + 0,321 X_1 + 0,371 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

X₁ = Perencanaan anggaran

X₂ = Sistem informasi keuangan daerah

e = *Standar Error*

Dari persamaan regresi berganda diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 15.220 dan bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila variabel Perencanaan anggaran dan Sistem informasi keuangan daerah dalam keadaan konstan, maka tingkat Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 15.220.
2. Nilai koefisien regresi berganda yang diperoleh variabel perencanaan anggaran (X₁) sebesar 0,321 dengan arah hubungan positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan perencanaan anggaran maka akan diikuti juga dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,321 dengan asumsi sistem informasi keuangan daerah bersifat konstan.
3. Nilai koefisien regresi berganda yang diperoleh variabel informasi keuangan daerah (X₂) sebesar 0,371 dengan arah hubungan positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan informasi keuangan daerah maka akan diikuti juga dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,371 dengan asumsi perencanaan anggaran bersifat konstan.

4.5.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung yang diperoleh dengan nilai Ftabel atau dengan tingkat signifikansi yang dihasilkan dari *output* SPSS. Berikut ini merupakan hasil dari uji F yang dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139,872	2	69,936	15,370	.000 ^b
	Residual	191,106	42	4,550		
	Total	330,978	44			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan Anggaran						

Sumber: hasil penelitian, 2022

Berdasarkan hasil dari uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,370 sedangkan nilai Ftabel diperoleh melalui tabel F dengan persamaan ($Dk = k-1$, $Df: n-k-1$) sehingga $Dk: 2-1=1$, $Df: 45-2-1=43$, maka diperoleh Ftabel sebesar 4,067 yang artinya $Fhitung > Ftabel$ ($15,370 > 4,067$) dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,050$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi keuangan daerah dan perencanaan anggaran dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif (Sanusi, 2011: 136). Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011:136). Berikut ini merupakan tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *R square* yang dihasilkan dari *output* SPSS yang dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	0,423	0,395	2,13311
a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan Anggaran				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah				

Sumber: hasil penelitian, 2022

Hasil dari pengujian ini dapat diketahui nilai dari koefisien determinasi *R square* yang diperoleh sebesar 0,423. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan daerah 42% dapat dijelaskan oleh variabel sistem informasi keuangan daerah, perencanaan anggaran. Sedangkan sisanya 58% kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel Sistem Akuntantansi Keuangan Daerah, Kualitas

Aparatur Pemerintah Daerah dan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.6 Pembahasan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari hasil uji uji hipotesis dalam penelitian ini, maka pembahasan dari hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel perencanaan anggaran memperoleh nilai T_{hitung} sebesar 2,787 dan nilai T_{tabel} sebesar 1,681, yang artinya bahwa nilai T_{hitung} lebih lebih besar dari nilai T_{tabel} atau ($2,787 > 1,681$) dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari variabel ini sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 atau ($0,001 > 0,05$) yang dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2019) dan Pasulu,dkk (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Saiwah (2019) Perencanaan anggaran adalah suatu proses merencanakan pengeluaran dan penerimaan keuangan untuk suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintahan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi dan memperkirakan pendapatan yang diharapkan, serta menentukan pengeluaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian anggaran dengan laporan keuangan, pengendalian biaya, transparansi,

akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik dapat memastikan alokasi dana yang tepat, mengontrol biaya yang digunakan, dan memperkuat akuntabilitas (Musdalifah, 2019). Selain itu, perencanaan anggaran yang baik juga memungkinkan evaluasi kinerja dan pencapaian tujuan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan.

4.6.2 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel sistem informasi keuangan daerah memperoleh nilai Thitung sebesar 4,450 dan nilai Ttabel sebesar 1,681, yang artinya bahwa nilai Thitung lebih lebih besar dari nilai Ttabel atau ($4,450 > 1,681$) dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari variabel ini sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 > 0,05$) yang dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusup (2016), Lestari & Dewi (2020) yang menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Wahid (2019) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan dengan baik, dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik serta dapat

meningkatkan akurasi, konsistensi, transparansi, akuntabilitas, pelacakan, auditabilitas, efisiensi dan produktivitas sehingga laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang baik juga dapat meminimalkan terjadinya *human error* sehingga dapat memberikan informasi yang jelas, akurat dan relevan (Chairina & Wehartaty, 2019). Dengan demikian pemanfaatan sistem keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah.

4.6.3 Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Secara Bersama-Sama (Simultan) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 15,370 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai F_{tabel} 4,067 atau ($15,370 > 4,067$) dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti secara bersama-sama (simultan) perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada taraf signifikansi α 0,05 %.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah secara simultan memiliki berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan yang dimanfaatkan serta dijalankan dengan baik, dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik. Dikarenakan perencanaan anggaran

yang akurat, sistem yang terintegrasi, pengendalian internal yang efektif, dan transparansi yang tinggi, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta dapat dipercaya yang berguna dalam pengambilan sebuah keputusan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan variabel perencanaan anggaran memperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa dengan perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik akan berperan sangat penting dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan variabel sistem informasi keuangan daerah memperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis data yang telah dilakukan membuktikan bahwa dengan pemanfaatan sistem informasi keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan variabel perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang membuktikan

bahwa perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa jika perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan telah dijalankan dengan baik dan semestinya maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi masukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Simeulue diharapkan agar dapat meningkatkan dalam mengelolah sistem informasi yang mempermudah masyarakat untuk update informasi.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Simeulue diharapkan dapat melengkapi data untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang melalui penelitian yang lebih mendalam tentang perencanaan anggaran dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah atau mengganti dengan variabel lainnya seperti Sistem Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah. Diharapkan pada penelitian yang selanjutnya agar dapat mengganti instrumen penelitian dengan metode wawancara atau teknik pengumpulan data lainnya,

dikarenakan instrumen kuesioner terdapat keterbatasan yaitu jawaban mungkin saja tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020. *Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2019-2020*. Aceh., Badan Pusat Statistik.
- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKPD Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 31-39.
- Dwiyanto, A. Dkk. 2010. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Evicahyani dan Setiawina. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E-*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. ISSN: 2337-3067.
- Ghozali (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Government Accounting Standard Board (GASB). 2009. Pernyataan Konsep No. 54: Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pelaporan Saldo Dana, dan Defisi Jenis Dana Pemerintah.
- Halim, A., dan Kusufi, M. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Rahmawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Academica Fisip Untad Februari*. 4 (1): 816-829.
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap dan Syafari, S. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-anggaran.html>.
 Diakses pada 28 Maret 2022
- Humas DJPK. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah. djpk.kemenkeu.go.id. 27 November 2021.

- Kuasa, Nadirsyah, dan Abdullah S. 2016. Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol 5. No 2.
- Lestari, N., dan Dewi, N. 2020. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol 11. No 2.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Musdalifah, M. (2019). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Pasulu, M., Hasliah, H., & Pragemini, P. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan (SIMRAL) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(1), 78-90.
- Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005: Pasal 6.
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Prawiro, M. 2020. Pengertian Anggaran: Memahami Apa Itu Anggaran, Jenis, Manfaat, dan Tujuannya.
- Ratag, W. A., G.Kumenaung,A. dan Daisy, .S.M. 2019. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *E-jurnal Pembangunan Ekonomi Keuangan Universitas Sam Ratulangi*. Vol.20. No.3.
- Sanusi, A. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sarjono, H dan Julianita, W. 2018. *SPSS Vs Lisrel: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta. Salemba Empat.

- Sriwijayanti, H. 2018. Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*. Vol 7. No 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung., Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung., Alfabeta.
- Suhendro. S, Wijayanti. A. dan Pahlawan. W. E. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal : 2(2), 162-172*
- Sujarweni, V, W. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Yusup, M. 2016. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*. Vol 10. No 2.
- Zulganef, 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahid,A.2019.<http://repository.stienobelindonesia.ac.id/bitstream/handle/123456789/771/ABDUL%20WAHID.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuisisioner Penelitian

Responden Yang Terhormat,

Saya mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar dengan konsentrasi Akuntansi Pemerintah. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan tugas akhir dengan topik penelitian “ **Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue) ”**. Hasil survei akan dipakai sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, saya mengharapkan partisipasi bapak/ibu/saudara(i) dengan mengisi kuisisioner ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang **PERLU DIPERHATIKAN** dalam pengisian kuisisioner ini :

- Tidak ada jawaban **BENAR** atau **SALAH**. Karena itu, isilah kuisisioner ini dengan jawaban yang paling sesuai dengan diri bapak/ibu/saudara(i)
- Setiap jawaban akan sangat bermakna bagi kami. Dengan demikian, kami mengharapkan tidak ada jawaban yang dikosongkan.
- Jawaban responden akan diperlakukan sesuai dengan standar profesionalitas dan etika penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas bapak/ibu/saudara(i).

Atas perhatian bapak/ibu/saudara(i), saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Peneliti,

Dina Febri Anggrain

Profil Responden

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan data diri anda.

- 1 Jenis kelamin Pria Wanita
- 2 Usia 21-30 tahun 31-40 tahun
 41-50 tahun 51-60 tahun
- 3 Pendidikan terakhir SMA atau sederajat D1/D2/D3
 S1 (Sarjana) S2 (Magister)
 S3 (Dokter)
- 4 Masa kerja < 5 tahun 5-10 tahun
 11-15 tahun > 15 tahun

Pendapat terhadap hal hal di bawah ini

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban setiap pertanyaan berikut dengan menggunakan skala di bawah ini sebagai pilihan jawaban

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)

LAMPIRAN

Lampiran 1

I. Kuisoner Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pengelolaan keuangan ditempat saya bekerja dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target.					
2	Pengelolaan keuangan ditempat saya bekerja dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah.					
3	Laporan keuangan dan laporan hasil audit dari BPK ditempat saya bekerja dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah.					
4	Masyarakat mengetahui mengenai APBD.					
5	Laporan keuangan SKPD ditempat saya bekerja direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK.					
6	Pengelolaan keuangan ditempat saya bekerja dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif.					
7	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah.					
8	Laporan keuangan ditempat saya bekerja disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.					
9	Laporan keuangan ditempat saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.					
10	Laporan keuangan ditempat saya bekerja dibuat sesuai SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Kas.					

Sumber: dimodifikasi dari penelitian Luky K (2015), Rezky (2014), Hardianto (2013).

II. Kuisioner Perencanaan Anggaran (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Proses penyusunan perencanaan anggaran di instansi saya berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.					
2	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					
3	Perencanaan anggaran di instansi saya melibatkan aspirasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan daerah.					
4	SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD.					
5	Dalam penyusunan perencanaan anggaran instansi saya menggunakan instrument seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.					
6	Sebagian kegiatan/belanja langsung dalam RKA-OPD disusun berdasarkan hasilMusrenbang yang tercantum dalam KUA PPAS.					
7	Output program/kegiatan yang direncanakan di instansi saya mendukung pencapaian sasaran Renja/Renstra.					
8	OPD banyak mengalami kendala teknis (aplikasi, komputer) dalam proses penyusunan anggaran.					
9	Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					
10	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan					

	standar pelayanan minimal yang ditetapkan.					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Deliana 2021

III. Kuisisioner Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₂)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Di tempat saya bekerja telah memiliki kapasitas komputer yang memadai untuk melaksanakan tugas.					
2	Di tempat saya bekerja telah terpasang jaringan internet dengan kapasitas yang memadai					
3	Di tempat saya bekerja jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4	Pengolahan data transaksi keuangan ditempat saya bekerja menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.					
5	Laporan keuangan/akuntansi dan manajerial ditempat saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
6	Penerapan sistem akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
7	Di tempat saya bekerja peralatan pendukung sistem informasi (komputer, jaringan internet, dst) yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					
8	Di tempat saya bekerja proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
9	Di tempat saya bekerja sudah mempunyai website untuk					

	mempermudah informasi-informasi.					
10	Sub bagian keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah menggunakan <i>software</i> aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : <i>Microsoft Excel</i> , MYOB, dan sebagainya.					

Sumber: Penelitian Idward (2017).

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 3

Daftar populasi penelitian

No	Nama Instansi/Dinas/Badan	Jumlah Jabatan Struktural	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Jabatan Fungsional Umum	Jumlah PNS
1	Sekretariat Daerah	18	28	51	97
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	7	3	12	22
3	Inspektorat	10	28	5	43
4	Dinas Pendidikan	9	1008	251	1268
5	Dinas Kesehatan	23	260	167	450
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	11	12	28	51
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	16		10	26
8	Dinas Sosial	12	1	11	24
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	4	9	22
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8	1	30	39
11	Dinas Pertanian dan Pangan	21	25	30	76
12	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	16		28	44
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	4	20	34
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8		15	23
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15		12	27
16	Dinas Perhubungan	13	1	13	27
17	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	13		15	28

18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	9	12	9	30
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	6	9	22
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8	6	10	24
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	10	18	36
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14		29	43
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11	2	32	45
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	5	13	26
25	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	22		14	36
26	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	4		8	12
27	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3		7	10
28	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4		7	11
29	Sekretariat Baitul Mal	4		8	12
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6	14	26
31	Rumah Sakit Umum Daerah	13	66	206	285
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14		8	22
33	Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur	7		16	23
34	Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan	7	1	28	36

35	Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah	7		23	30
36	Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat	6		24	30
37	Sekretariat Kecamatan Salang	7		24	31
38	Sekretariat Kecamatan Teupah Barat	9		29	38
39	Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam	5		13	18
40	Sekretariat Kecamatan Alafan	7		16	23
41	Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah	6		18	24
42	Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut	7		11	18
43	Dinas Pertanahan	8		4	12
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11		12	23
45	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	16		11	27
	Total	457			

Lampiran 4

Jawaban Responden

1. Perencanaan Anggaran (X1)

Jumlah Responden	Perencanaan Anggaran (X1)										X1
	X1,1	X1,2	X1,3	X1,4	X1,5	X1,6	X1,7	X1,8	X1,9	X1,10	
1	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	40
2	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	40
3	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5	43
4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	44
5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	41
6	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	40
7	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	37
8	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	37
9	3	4	5	5	5	4	4	3	4	4	41
10	3	4	4	5	5	4	4	2	4	4	39
11	3	4	4	5	5	4	4	2	4	4	39
12	3	5	4	4	5	5	5	2	4	4	41
13	3	5	4	4	5	5	5	2	5	5	43
14	4	4	4	5	5	5	5	3	5	5	45
15	4	4	4	5	5	5	5	3	5	5	45
16	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	48
17	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	48
18	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	47
19	5	4	5	4	4	4	4	2	5	5	42
20	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4	40
21	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4	40
22	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	39
23	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46
24	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	45
25	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	45
26	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
27	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
28	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	47
29	5	5	4	5	5	4	4	3	5	5	45
30	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	42
31	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	43
32	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	43
33	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	41
34	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5	41
35	5	5	4	3	4	4	4	2	5	5	41
36	5	5	4	3	4	4	4	2	4	4	39
37	4	5	5	3	4	5	4	2	4	4	40
38	4	5	5	4	4	5	4	2	4	4	41
39	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	39

40	5	5	5	4	4	5	4	2	4	4	42
41	5	5	5	5	4	5	4	2	4	4	43
42	4	4	3	3	4	5	5	2	4	4	38
43	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	36
44	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	36
45	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	36

2. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Responden	Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₂)										X ₂
	x _{2,1}	x _{2,2}	x _{2,3}	x _{2,4}	x _{2,5}	x _{2,6}	x _{2,7}	x _{2,8}	x _{2,9}	x _{2,10}	
1	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	37
2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	37
3	2	2	4	5	5	5	4	5	4	5	41
4	2	2	4	5	4	4	4	4	4	5	38
5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	37
6	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	37
7	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	37
8	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	46
9	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	46
10	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
11	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
12	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
13	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
14	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
15	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	46
16	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	42
17	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	40
18	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	40
19	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	46
20	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
21	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
22	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
23	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
24	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	46
25	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	46
26	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	44
27	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
28	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
29	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	44
30	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	45
31	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	45
32	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	45
33	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
34	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	46

35	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
37	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	40
38	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	40
39	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	45
40	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	46
41	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	46
42	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	46
43	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
44	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
45	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47

3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Jumlah Responden	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)										Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
1	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	43
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	45
7	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	43
8	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	47
9	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
10	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
11	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
12	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
13	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
14	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
15	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	47
16	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47
17	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46
18	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
19	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	45
20	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	46
21	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	45
22	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	47
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
25	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
26	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	48
27	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
28	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46
29	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46

30	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
31	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
32	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	43
33	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
34	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
38	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
39	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
40	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	45
41	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	46
42	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	46
43	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	45
44	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	44
45	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	44

Mean		4.27	4.47	4.20	4.20	4.40	4.51	4.29	2.67	4.42	4.44
Std. Error of Mean		0.107	0.075	0.103	0.103	0.074	0.075	0.068	0.101	0.074	0.075
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00
Mode		4 ^a	4	4	4	4	5	4	2 ^a	4	4
Std. Deviation		0.720	0.505	0.694	0.694	0.495	0.506	0.458	0.674	0.499	0.503
Variance		0.518	0.255	0.482	0.482	0.245	0.256	0.210	0.455	0.249	0.253
Range		2	1	2	2	1	1	1	2	1	1
Minimum		3	4	3	3	4	4	4	2	4	4
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
Sum		192	201	189	189	198	203	193	120	199	200

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Proses penyusunan perencanaan anggaran di instansi saya berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	7	15.6	15.6	15.6
Setuju	19	42.2	42.2	57.8
Sangat Setuju	19	42.2	42.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Dokumen RPJMD Menjabarkan Mengenai Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Yang Ingin Dicapai.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	24	53.3	53.3	53.3
	Sangat Setuju	21	46.7	46.7	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Perencanaan Anggaran Di Instansi Saya Melibatkan Aspirasi Semua Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Dalam Pembangunan Daerah.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	7	15.6	15.6	15.6
	Setuju	22	48.9	48.9	64.4
	Sangat Setuju	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

SKPD Dalam Hal Perencanaan Anggarannya Mengikuti Prioritas Dan PPAS Dalam Menyusun RKA-SKPD					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	7	15.6	15.6	15.6
	Setuju	22	48.9	48.9	64.4
	Sangat Setuju	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Instansi Saya Menggunakan Instrument Seperti Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Dan Standar Pelayanan Minimal.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	27	60.0	60.0	60.0
	Sangat Setuju	18	40.0	40.0	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sebagian Kegiatan/Belanja Langsung Dalam RKA-OPD Disusun Berdasarkan Hasil Musrenbang Yang Tercantum Dalam KUA PPAS.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	22	48.9	48.9	48.9
	Sangat Setuju	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Output Program/Kegiatan Yang Direncanakan Di Instansi Saya Mendukung Pencapaian Sasaran Renja/Renstra.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	32	71.1	71.1	71.1
	Sangat Setuju	13	28.9	28.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

OPD banyak mengalami kendala teknis (aplikasi, komputer) dalam proses penyusunan anggaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	20	44.4	44.4	44.4
	Netral	20	44.4	44.4	88.9
	Setuju	5	11.1	11.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	26	57.8	57.8	57.8
	Sangat Setuju	19	42.2	42.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Adanya Sikronisasi Program Dan Kegiatan Antara SKPD Dengan Kinerja SKPD Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Yang Ditetapkan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	25	55.6	55.6	55.6
	Sangat Setuju	20	44.4	44.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

5.1.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah

Statistics											
		Di tempat saya bekerja telah memiliki kapasitas komputer yang memadai untuk melaksanakan tugas.	Di tempat saya bekerja telah terpasang jaringan internet dengan kapasitas yang memadai	Di tempat saya bekerja jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan .	Pengolahan data transaksi keuangan ditempatkan saya bekerja menggunakan software yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.	Laporan keuangan/akuntansi dan manajerial ditempatkan saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.	Penerapan sistem akuntansi pada instansi tempat Saya bekerja sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Di tempat saya bekerja peralatan pendukung sistem informasi (komputer, jaringan internet, dst) yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.	Di tempat saya bekerja proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	Di tempat saya bekerja sudah mempunyai website untuk mempermudah informasi-informasi.	Sub bagian keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah menggunakan software aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : Microsoft Excel, MYOB, dan sebagainya.
N	Valid	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.64	3.96	4.42	4.51	4.51	4.53	4.53	4.69	4.58	4.80
Std. Error of Mean		0.139	0.156	0.074	0.075	0.075	0.075	0.075	0.070	0.074	0.060
Median		4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Mode		4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

Std. Deviation		0.933	1.043	0.499	0.506	0.506	0.505	0.505	0.468	0.499	0.405
Variance		0.871	1.089	0.249	0.256	0.256	0.255	0.255	0.219	0.249	0.164
Range		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimum		2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sum		164	178	199	203	203	204	204	211	206	216

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Di Tempat Saya Bekerja Telah Memiliki Kapasitas Komputer Yang Memadai Untuk Melaksanakan Tugas.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	15.6	15.6	15.6
	Netral	9	20.0	20.0	35.6
	Setuju	22	48.9	48.9	84.4
	Sangat Setuju	7	15.6	15.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Di Tempat Saya Bekerja Telah Terpasang Jaringan Internet Dengan Kapasitas Yang Memadai					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	15.6	15.6	15.6
	Netral	4	8.9	8.9	24.4
	Setuju	18	40.0	40.0	64.4
	Sangat Setuju	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Di Tempat Saya Bekerja Jaringan Internet Telah Dimanfaatkan Sebagai Penghubung Antar Unit Kerja Dalam Pengiriman Data Dan Informasi Yang Dibutuhkan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	26	57.8	57.8	57.8
	Sangat Setuju	19	42.2	42.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Pengolahan Data Transaksi Keuangan Ditempat Saya Bekerja Menggunakan Software Yang Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Yang Berlaku.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	22	48.9	48.9	48.9
	Sangat Setuju	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Laporan Keuangan/Akuntansi Dan Manajerial Ditempat Saya Bekerja Dihasilkan Dari Sistem Informasi Yang Terintegrasi.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	22	48.9	48.9	48.9
	Sangat Setuju	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Penerapan Sistem Akuntansi Pada Instansi Tempat Saya Bekerja Sudah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	21	46.7	46.7	46.7
	Sangat Setuju	24	53.3	53.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Di Tempat Saya Bekerja Peralatan Pendukung Sistem Informasi (Komputer, Jaringan Internet, Dst) Yang Usang/Rusak Didata Dan Diperbaiki Tepat Pada Waktunya.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	21	46.7	46.7	46.7
	Sangat Setuju	24	53.3	53.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Di Tempat Saya Bekerja Proses Akuntansi Sejak Awal Transaksi Hingga Pembuatan Laporan Keuangan Dilakukan Secara Komputerisasi.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	14	31.1	31.1	31.1
	Sangat Setuju	31	68.9	68.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Di Tempat Saya Bekerja Sudah Mempunyai Website Untuk Mempermudah Informasi-Informasi.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	19	42.2	42.2	42.2
	Sangat Setuju	26	57.8	57.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sub Bagian Keuangan Pada Instansi Tempat Saya Bekerja Telah Menggunakan Software Aplikasi Untuk Melaksanakan Tugas, Seperti : Microsoft Excel, MYOB, Dan Sebagainya.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	9	20.0	20.0	20.0
	Sangat Setuju	36	80.0	80.0	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

5.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Statistics											
		Pengelolaan keuangan ditempatkan saya bekerja dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target.	Pengelolaan keuangan ditempatkan saya bekerja dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah .	Laporan keuangan dan laporan hasil audit dari BPK ditempatkan saya bekerja dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah.	Masyarakat mengetahui mengenai APBD.	Laporan keuangan SKPD ditempatkan saya bekerja direview oleh inspektora t sebelum diserahkan kepada BPK.	Pengelolaan keuangan ditempatkan saya bekerja dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif.	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah.	Laporan keuangan ditempatkan saya bekerja disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan .	Laporan keuangan ditempatkan saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti .	Laporan keuangan ditempatkan saya bekerja dibuat sesuai SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Kas.
N	Valid	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.40	4.58	4.44	4.53	4.47	4.42	4.51	4.56	4.58	4.53
Std. Error of Mean		0.074	0.074	0.075	0.075	0.075	0.074	0.075	0.075	0.074	0.075
Median		4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Mode		4	5	4	5	4	4	5	5	5	5
Std. Deviation		0.495	0.499	0.503	0.505	0.505	0.499	0.506	0.503	0.499	0.505

Variance		0.245	0.249	0.253	0.255	0.255	0.249	0.256	0.253	0.249	0.255
Range		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimum		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maximum		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sum		198	206	200	204	201	199	203	205	206	204

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Pengelolaan Keuangan Ditempat Saya Bekerja Dilakukan Secara Efektif Agar Semua Program Tercapai Sesuai Target.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	27	60.0	60.0	60.0
	Sangat Setuju	18	40.0	40.0	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Pengelolaan Keuangan Ditempat Saya Bekerja Dilakukan Secara Efesien Untuk Mencapai Tujuan Pemerintah.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	19	42.2	42.2	42.2
	Sangat Setuju	26	57.8	57.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Laporan Keuangan Dan Laporan Hasil Audit Dari BPK Ditempat Saya Bekerja Dipublikasikan Di Website Resmi Pemerintah Daerah.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	25	55.6	55.6	55.6
	Sangat Setuju	20	44.4	44.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Masyarakat Mengetahui Mengenai APBD.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	21	46.7	46.7	46.7
	Sangat Setuju	24	53.3	53.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Laporan Keuangan SKPD Ditempat Saya Bekerja Direview Oleh Inspektorat Sebelum Diserahkan Kepada BPK.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	24	53.3	53.3	53.3
	Sangat Setuju	21	46.7	46.7	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Pengelolaan Keuangan Ditempat Saya Bekerja Dilakukan Secara Ekonomis Agar Terhindar Dari Pemborosan Dan Tidak Produktif.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	26	57.8	57.8	57.8
	Sangat Setuju	19	42.2	42.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Masyarakat Mudah Untuk Mendapatkan Informasi Keuangan Di Pemerintah Daerah.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	22	48.9	48.9	48.9
	Sangat Setuju	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Laporan Keuangan Ditempat Saya Bekerja Disampaikan Oleh Kepala Daerah Kepada BPK Untuk Dilakukan Pemeriksaan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	20	44.4	44.4	44.4
	Sangat Setuju	25	55.6	55.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Laporan Keuangan Ditempat Saya Bekerja Telah Disusun Secara Sistematis Sehingga Mudah Dimengerti.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	19	42.2	42.2	42.2
	Sangat Setuju	26	57.8	57.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Laporan Keuangan Ditempat Saya Bekerja Dibuat Sesuai SAP Yang Terdiri Dari LRA, Neraca, Dan Catatan Atas Laporan Kas.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	21	46.7	46.7	46.7
	Sangat Setuju	24	53.3	53.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

5.2 Uji Validitas

5.2.1 Perencanaan Anggaran

Correlations												
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	Perencanaan Anggaran
x1.1	Pearson Correlation	1	.463**	.437**	0.073	-0.115	0.054	-0.032	0.140	0.249	0.293	.476**
	Sig. (2-tailed)		0.001	0.003	0.635	0.453	0.724	0.834	0.357	0.100	0.051	0.001
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.2	Pearson Correlation	.463**	1	.441**	0.182	0.236	0.291	0.092	0.134	0.192	0.239	.550**
	Sig. (2-tailed)	0.001		0.002	0.232	0.118	0.052	0.549	0.382	0.205	0.114	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.3	Pearson Correlation	.437**	.441**	1	.528**	.357*	.415**	0.100	0.243	0.013	0.000	.643**
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.002		0.000	0.016	0.005	0.513	0.108	0.932	1.000	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.4	Pearson Correlation	0.073	0.182	.528**	1	.753**	.350*	.314*	.583**	0.210	0.195	.729**

x1.9	Pearson Correlation	0.249	0.192	0.013	0.210	0.220	0.026	.349*	0.225	1	.956**	.539**
	Sig. (2-tailed)	0.100	0.205	0.932	0.167	0.146	0.865	0.019	0.137		0.000	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.10	Pearson Correlation	0.293	0.239	0.000	0.195	0.183	-0.020	.318*	0.246	.956**	1	.537**
	Sig. (2-tailed)	0.051	0.114	1.000	0.198	0.230	0.897	0.033	0.103	0.000		0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Perencanaan Anggaran	Pearson Correlation	.476**	.550**	.643**	.729**	.676**	.566**	.561**	.640**	.539**	.537**	1
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

x2.4	Pearson Correlation	0.249	0.044	0.116	1	.822**	.689**	.422**	.303*	0.244	.400**	.581**
	Sig. (2-tailed)	0.098	0.774	0.448		0.000	0.000	0.004	0.043	0.106	0.006	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.5	Pearson Correlation	.442**	0.216	0.116	.822**	1	.867**	.422**	.303*	0.244	.400**	.697**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.153	0.448	0.000		0.000	0.004	0.043	0.106	0.006	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.6	Pearson Correlation	.412**	.305*	0.168	.689**	.867**	1	.464**	.430**	0.283	.423**	.732**
	Sig. (2-tailed)	0.005	0.042	0.269	0.000	0.000		0.001	0.003	0.060	0.004	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.7	Pearson Correlation	0.219	.348*	0.078	.422**	.422**	.464**	1	0.141	0.283	0.200	.533**
	Sig. (2-tailed)	0.149	0.019	0.610	0.004	0.004	0.001		0.355	0.060	0.187	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.8	Pearson Correlation	.365*	.343*	.477**	.303*	.303*	.430**	0.141	1	.300*	.384**	.597**

	Sig. (2-tailed)	0.014	0.021	0.001	0.043	0.043	0.003	0.355		0.045	0.009	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.9	Pearson Correlation	.304*	0.268	.366*	0.244	0.244	0.283	0.283	.300*	1	.360*	.534**
	Sig. (2-tailed)	0.042	0.075	0.013	0.106	0.106	0.060	0.060	0.045		0.015	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.10	Pearson Correlation	0.229	0.194	.315*	.400**	.400**	.423**	0.200	.384**	.360*	1	.532**
	Sig. (2-tailed)	0.131	0.202	0.035	0.006	0.006	0.004	0.187	0.009	0.015		0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pearson Correlation	.793**	.741**	.608**	.581**	.697**	.732**	.533**	.597**	.534**	.532**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

y4	Pearson Correlation	0.218	.643**	.837**	1	.607**	0.078	-0.202	-0.120	-0.078	-0.161	.517**
	Sig. (2-tailed)	0.150	0.000	0.000		0.000	0.610	0.183	0.434	0.610	0.292	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y5	Pearson Correlation	0.145	.439**	.598**	.607**	1	0.102	-0.154	-0.060	-0.012	-0.196	.452**
	Sig. (2-tailed)	0.340	0.003	0.000	0.000		0.504	0.311	0.697	0.938	0.196	0.002
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y6	Pearson Correlation	.496**	0.184	0.141	0.078	0.102	1	.476**	-0.050	.549**	-0.102	.524**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.226	0.356	0.610	0.504		0.001	0.743	0.000	0.504	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y7	Pearson Correlation	.526**	-0.026	-0.199	-0.202	-0.154	.476**	1	.378*	.784**	.422**	.549**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.865	0.190	0.183	0.311	0.001		0.011	0.000	0.004	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y8	Pearson Correlation	0.274	-0.040	-0.100	-0.120	-0.060	-0.050	.378*	1	.322*	.867**	.453**

	Sig. (2-tailed)	0.069	0.793	0.513	0.434	0.697	0.743	0.011		0.031	0.000	0.002
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y9	Pearson Correlation	.514**	0.089	-0.050	-0.078	-0.012	.549**	.784**	.322*	1	.373*	.637**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.561	0.743	0.610	0.938	0.000	0.000	0.031		0.012	0.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
y10	Pearson Correlation	.309*	-0.078	-0.149	-0.161	-0.196	-0.102	.422**	.867**	.373*	1	.418**
	Sig. (2-tailed)	0.039	0.610	0.327	0.292	0.196	0.504	0.004	0.000	0.012		0.004
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Pearson Correlation	.763**	.604**	.553**	.517**	.452**	.524**	.549**	.453**	.637**	.418**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.000	0.004	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

5.3 Uji Realibilitas

5.3.1 variabel perencanaan anggaran x1

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.745	11

5.3.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.754	11

5.3.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.733	11

5.4 Uji Asumsi Klasik

5.4.1 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.08406300
Most Extreme Differences	Absolute	0.089
	Positive	0.064
	Negative	-0.089
Test Statistic		0.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

5.4.2 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Perencanaan Anggaran	0.999	1.001
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	0.999	1.001
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah			

5.4.3 Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0.03836
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	18
Z	-1.505
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.132
a. Median	

5.4.4 Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.759	3.007		2.248	0.030
	Perencanaan Anggaran	-0.065	0.052	-0.189	-1.263	0.213
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	-0.053	0.046	-0.172	-1.148	0.257
a. Dependent Variable: ABS_RES						

5.5 Uji Hipotesis

5.5.1 Analisis Regresi Berganda (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.220	5.461		2.787	0.008
	Perencanaan Anggaran	0.321	0.094	0.400	3.413	0.001
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	0.371	0.083	0.522	4.450	0.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

5.5.2 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	42%	0.395	2.13311

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan Anggaran

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

5.5.3 Uji Pengaruh Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139.872	2	69.936	15.370	.000 ^b
	Residual	191.106	42	4.550		
	Total	330.978	44			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan Anggaran

Biodata Peneliti

Nama : Dina Febri Anggraini
Nim : 1805906030051
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 11 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat, Kab.
Simeulue, Prov. Aceh
No. Hp : 085294648597

BIODATA ORANG TUA

Nama Ayah : Akmaludin.Z
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat, Kab.
Simeulue, Prov. Aceh
Nama Ibu : Alm. Neng Hartati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat, Kab.
Simeulue, Prov. Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 3 Teupah Barat : Lulus Tahun (2012)
SMP Negeri 1 Teupah Barat : Lulus Tahun (2015)
SMA Negeri 1 Teupah Barat : Lulus Tahun (2018)